



- c. Intensifikasi tindak lanjut pengaduan melalui Laporan SP4N dan optimalisasi giat whistleblowing system terintegrasi dengan KPK RI, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Adapun Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.892.944.750	15.244.175.696	85,20
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	122.560.000	111.628.873	91,08
2	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	11.307.977.940	9.606.896.397	84,96
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.048.257.940	9.397.656.397	85,06
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	236.880.000	209.240.000	88,33
4	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22.840.000	-	0,00
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	76.700.000	75.503.076	98,44
5	Pengamanan barang milik daerah SKPD	76.700.000	75.503.076	98,44
4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	324.137.500	248.812.510	76,76
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	188.856.510	94,43
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai	124.137.500	59.956.000	48,30



	berdasarkan tugas dan fungsi			
5	Administrasi umum perangkat daerah	1.045.154.930	891.848.940	85,33
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.997.760	99,99
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.750.000	88.707.788	99,95
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	40.000.000	39.960.666	99,90
11	Penyediaan bahan logistik kantor	28.921.000	14.008.000	48,44
12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	104.000.000	68.109.045	65,49
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	61.000.000	48.492.000	79,50
14	Fasilitas kunjungan tamu	30.000.000	6.330.000	21,10
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	672.483.930	606.243.681	90,15
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.215.000.000	1.205.990.966	99,26
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.000.000	794.868.003	99,36
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	415.000.000	411.122.963	99,07
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.520.414.380	2.105.816.124	83,55
18	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	10.000.000	50,00
19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	460.000.000	358.132.124	77,85
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.040.414.380	1.737.684.000	85,16
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.281.000.000	997.678.810	77,88
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	670.000.000	413.581.982	61,73
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	120.500.000	93.782.600	77,83
23	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	90.000.000	89.818.098	99,80
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.500.000	400.496.130	100,00
Urusan Komunikasi dan Informatika				
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	8.624.088.325	8.490.357.260	98,45
25	Pelayanan Informasi Publik	44.121.226	43.379.125,00	98,32
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan	104.374.768	93.241.279	89,33



	Aspirasi Publik			
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	44.218.713	36.687.447,00	82,97
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	290.860.594	285.219.904,00	98,06
29	Diseminasi Informasi	3.617.588.882	3.610.889.136,00	99,81
30	Penyusunan Konten	508.191.920	461.011.314,00	90,72
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	39.708.363	38.210.784,00	96,23
32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	81.091.132	72.641.298,00	89,58
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.254.295.421	1.237.982.460,00	98,70
34	Relasi Media	2.639.637.306	2.611.094.513,00	98,92
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.518.775.263	4.326.556.142	95,75
10	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	143.730.685	141.303.550	98,31
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	143.730.685	141.303.550,00	98,31
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	4.375.044.578	4.185.252.592	95,66
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	853.033.749	828.427.212,00	97,12
37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	580.669.880	558.200.780,00	96,13
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.576.822.005	2.470.907.206,00	95,89
39	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	54.703.250	52.269.420,00	95,55
40	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	98.017.275	75.178.106	76,70
41	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	211.798.419	200.269.868,00	94,56
Urusan Statistik				
IV	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	366.801.933	306.613.340	83,59



12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	366.801.933	306.613.340	83,59
42	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	91.150.136	89.468.733	98,16
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18.288.723	3.538.016	19,35
44	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	45.532.581	28.970.089,00	63,62
45	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	211.830.493	184.636.502,00	87,16
Urusan Persandian				
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	204.607.238	188.812.827	92,28
13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	174.734.313	159.382.642	91,21
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	27.970.055	17.522.758,00	62,65
47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	146.764.258	141.859.884,00	96,66
14	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185	98,52
48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.872.925	29.430.185,00	98,52
TOTAL		31.607.217.509	28.556.515.265	90,35